

BAB I

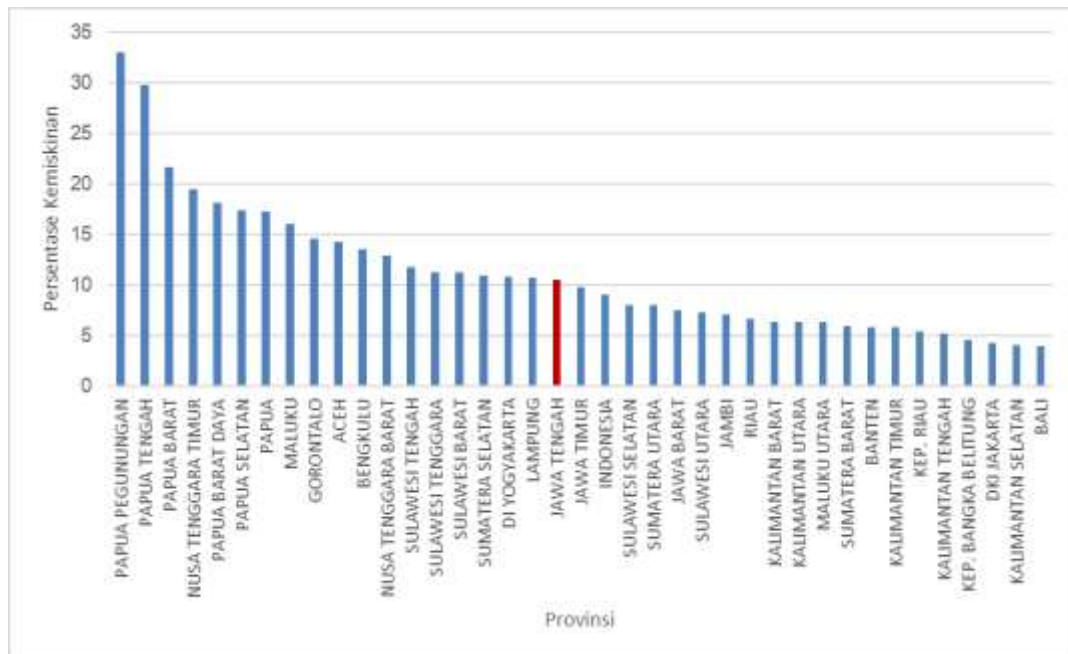
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan pembangunan ekonomi yang masih dihadapi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, namun juga mencerminkan keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak (Attoma & Matteucci, 2024). Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan belum berjalan secara optimal. Maka dari itu, menurunkan kemiskinan merupakan salah satu tujuan dan pencapaian pembangunan nasional maupun daerah.

Permasalahan kemiskinan masih menjadi tantangan yang kompleks di Indonesia. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat selama dekade terakhir, pemerataan kekayaan tetap tidak merata sehingga mengakibatkan ketimpangan dalam kesejahteraan ekonomi (Prasetyo & Kistanti, 2020). Berdasarkan Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2024 mencapai 25,21 juta jiwa dan persentase penduduk miskin sebesar 9,03 persen. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan Maret 2023 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25,89 juta dan persentase penduduk miskin sebesar 9,36 persen. Selain itu jumlah penduduk miskin di wilayah pedesaan tercatat lebih besar dibandingkan wilayah perkotaan, yaitu sebesar 13,01 juta jiwa, sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 11,05 juta jiwa. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa permasalahan kemiskinan di wilayah pedesaan masih menjadi perhatian dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Salah satu provinsi di Indonesia yang menghadapi permasalahan kemiskinan adalah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi kesembilan belas, berikut persentase kemiskinan setiap provinsi di Indonesia.

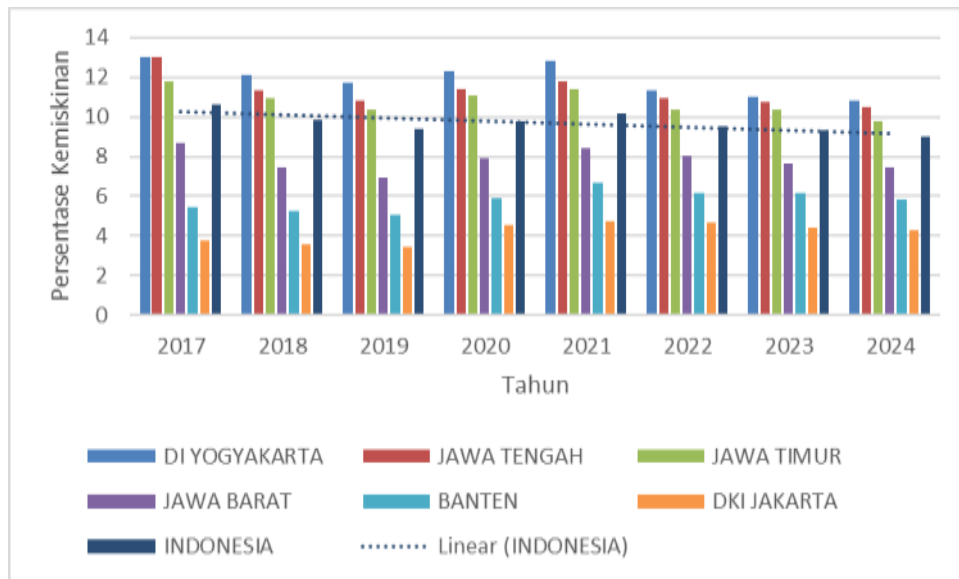


Gambar 1. 1 Persentase Kemiskinan 39 Provinsi di Indonesia, Tahun 2024
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.1 Provinsi Jawa Tengah memiliki urutan ke-19 se Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tidak terlalu tinggi. Kondisi tersebut menunjukkan skala permasalahan kemiskinan di Jawa tengah masih relatif besar dibandingkan dibandingkan provinsi lainnya. Tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia (Sari *et al.*, 2023). Pertama, berdasarkan statistik pendidikan yang dipublikasikan BPS, (2025), masih banyak penduduk yang belum memiliki kesempatan mendapatkan pendidikan di jenjang perguruan tinggi dan terdapat kesenjangan pada jenjang perguruan tinggi dan pendidikan menengah di daerah perkotaan dan pedesaan. Menurut Gubernur Jawa Tengah,

Ahmad Lutfi saat rembug pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung pada Rabu 3 Juni 2026 mengungkapkan di Jawa Tengah memiliki pendidikan yang rendah terutama tingginya anak putus sekolah di tingkat SMP karena memilih untuk bekerja. Maka dari itu, penduduk Provinsi Jawa Tengah didominasi oleh pekerja di sektor informal yang berpenghasilan rendah akan menurunkan kesejahteraan (Susiawati *et al.*, 2025). Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat pendidikan yang terjadi di Jawa Tengah yang dapat menurunkan produktivitas, kemampuan dan keterampilan masyarakat dalam memperoleh pendapatan yang layak (Syahrani *et al.*, 2021). Kedua, menurut Adi *et al.*, (2022) Provinsi Jawa Tengah memiliki tingkat kesehatan penduduk yang rendah, hal ini dapat menurunkan produktivitas dan meningkatkan biaya hidup. Kondisi tersebut menurunkan kemampuan penduduk dalam bekerja sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, tingginya kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi oleh kondisi pasar tenaga kerja. Tingginya tingkat pengangguran yang menggambarkan kemampuan pasar tenaga kerja untuk menyerap tenaga kerja, yang mengakibatkan meningkatkan risiko penduduk kehilangan pekerjaan dan terjerat kemiskinan (Firdaus *et al.*, 2026). Sementara itu, Provinsi Jawa Tengah juga masih tergolong tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di pulau Jawa. Hal ini dibuktikan berdasarkan gambar 1.2 dibawah ini.



Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Tertinggi di Pulau Jawa Tahun 2017-2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

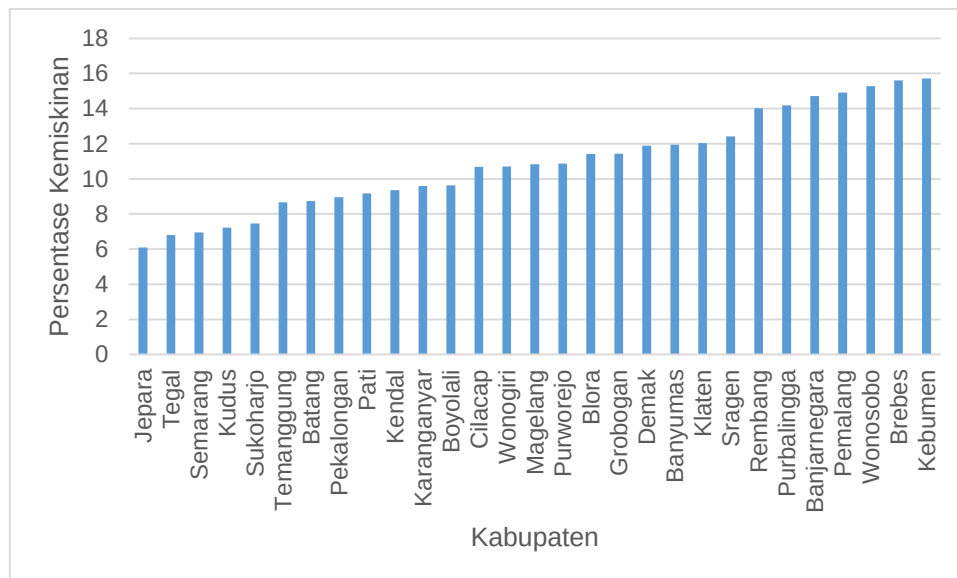
Pada gambar 1.2 menunjukkan bahwa 8 tahun terakhir persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah di peringkat kedua setelah DI Yogyakarta, dengan persentase kemiskinan Jawa Tengah mencapai 10,47% tahun 2024. Selain itu, persentase kemiskinan Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,03% pada Maret 2024. Meskipun tingkat kemiskinan cenderung menurun, persentase kemiskinan tetap berada diatas 10% (Khaqiqi & Sugiharti, 2025). Pada tahun 2017, persentase kemiskinan di Jawa Tengah sebesar 13,01%, kemudian menurun secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya hingga 10,8% pada tahun 2019. Penurunan tersebut mencerminkan kondisi kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, peningkatan kesempatan kerja dan kualitas sumber daya manusia yang membaik (Handayani, 2022). Namun, pada tahun 2020 meningkat sebesar 11,41%, hingga tahun 2021 sebesar 11,79%, yang mengindikasikan kontraksi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid-19. Peningkatan ini menunjukkan kemiskinan di Jawa Tengah dipengaruhi

pembatasan aktivitas ekonomi seperti hilangnya pekerjaan dan penurunan pendapatan, khususnya di sektor informal yang dimana mayoritas penduduk bekerja disektor tersebut (Wuranti, 2022).

Pada tahun 2022 hingga 2024, tingkat kemiskinan kembali menurun, dengan penurunan terendah mencapai 10,47% pada tahun 2024. Menurut Berita Resmi Statistik Jawa Tengah tahun 2022, yang diterbitkan oleh BPS (2022), penurunan ini dipengaruhi oleh pelonggaran aktivitas sosial dan kegiatan kerja masyarakat menyebabkan ekonomi mulai pulih, sehingga berpengaruh terhadap perbaikan kesejahteraan dan penurunan tingkat kemiskinan. Kondisi tersebut ditandai dari meningkatnya aktivitas konsumsi masyarakat, meningkatnya pendapatan pekerja, membaiknya kondisi pasar tenaga kerja yang dilihat dari penurunan angka pengangguran, serta sektor pertanian juga menunjukkan perkembangan yang positif sehingga berkontribusi dalam perbaikan kesejahteraan penduduk. Meskipun kemiskinan di Jawa Tengah menurun, penurunan tersebut relatif lambat dan belum signifikan. Hal ini menunjukkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah belum sepenuhnya turun, serta terdapat kendala struktural dalam kinerja pembangunan daerah (Maslakhah *et al.*, 2025).

Kemiskinan yang dialami Provinsi Jawa Tengah cenderung terjadi diwilayah pedesaan. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, pada September 2024 Jawa Tengah memiliki persentase penduduk miskin di pedesaan mencapai 10,45%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan di perkotaan mencapai 8,83%. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam infografis tahun 2025, mengklasifikasikan penduduk miskin menjadi dua yaitu kawasan pedesaan terdiri dari petani gurem, buruh tani, pekerja serabutan dan buruh industri kecil, sedangkan kawasan perkotaan yaitu pekerja serabutan, kuli bangunan dan

pedagang asongan. Selain itu tingkat kemiskinan antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan. Hal ini dibuktikan berdasarkan gambar 1.3 berikut:



Gambar 1. 3 Persentase kemiskinan di tingkat Kabupaten Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Persen)

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan gambar 1.3 penelitian ini menggunakan 29 Kabupaten di Jawa Tengah, yang dimana memiliki perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten. Selain itu, terdapat tujuh Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Tengah antara lain Kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo, Purbalingga, Banjarnegara, Pemalang dan Rembang. Pada tahun 2024 kemiskinan cenderung terjadi di wilayah kabupaten dibandingkan kota. Kabupaten Kebumen menduduki posisi pertama dengan persentase kemiskinan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 15,71%. Sedangkan persentase kemiskinan terendah terjadi di Kabupaten Jepara sebesar 6,09%. Kabupaten yang memiliki kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah cenderung berada di wilayah perbatasan barat dan selatan, serta memiliki ciri khas bahasa ngapak. Menurut Sari (2024) tingkat kemiskinan yang tersebar di bagian barat hingga Kabupaten

Banjarnegara dan Wonosobo identik dengan wilayah pegunungan dan pesisir pantai selatan. Wilayah tersebut didominasi pedesaan yang memperburuk ketimpangan, terutama keterbatasan penduduk dalam memperoleh layanan dasar dan ketergantungan pada sektor informal (Susiawati *et al.*, 2025). Hal tersebut menyebabkan masyarakat desa mengalami miskin ekstrem sulit untuk keluar dari lingkaran setan.

Kondisi tersebut didukung adanya faktor eksternal yang dimana daerah bagian barat Jawa Tengah memiliki keterbatasan pada akses pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta keberadaan daerah yang jauh dari Ibu Kota Provinsi semakin sulitnya penduduk dalam mengakses kebutuhan dasar. Jarak yang jauh ke pusat kota mengakibatkan masyarakat daerah kabupaten memerlukan waktu dan biaya yang besar dalam memenuhi kebutuhan akses kesehatan dan pendidikan, hal ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat (Sari *et al.*, 2023). Maka dari itu, pemerintah berupaya menanggulangi kemiskinan melalui berbagai kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Pemerintah pusat dan daerah berupaya menyelesaikan kemiskinan dengan penggunaan dana desa, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah pedesaan (Fatimah dan Deviani, 2024). Kemiskinan yang dialami masyarakat desa akan berkurang jika pendapatan masyarakat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai desa sebagai dasar yang mengatur pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran Dana Desa berguna dalam pembiayaan

kegiatan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa (Firdausy, 2017).

Peningkatan dana desa selama 11 tahun terakhir belum sepenuhnya menyelesaikan permasalahan kemiskinan di pedesaan. Hal ini dibuktikan berdasarkan data statistik persentase penduduk miskin secara relatif terjadi penurunan dari 16,56 persen pada tahun 2010 menjadi 13,58 persen pada maret 2015. Kondisi tersebut mencerminkan tingkat kemiskinan menurun dari waktu ke waktu sebelum pemerintah memberikan dana desa dalam APBN. Nyatanya dalam UU No 6 Tahun 2014 mengenai tujuan dana desa yakni bentuk kewajiban dalam memberdayakan desa dan melindungi agar desa dapat menjadi mandiri, demokrasi dan berkembang. Menurut Pandiangan *et al.*, (2021) pelaksanaan program dana desa merupakan solusi dari pemerintah pusat kepada desa untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar kabupaten atau kota, maka peningkatan jumlah dana desa menggambarkan fokus pemerintah dan komitmennya dalam kesenjangan pembangunan dan pengetasan kemiskinan dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Pemerintah provinsi jawa tengah dalam menyalurkan dana desa mengalami perkembangan setiap tahunnya. Berkaitan hal tersebut Provinsi Jawa Tengah memiliki 7.810 desa dan 753 kelurahan yang tersebar di 35 Kabupaten/kota. Berdasarkan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan perkembangan dana desa tersebar di 29 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2017 Provinsi Jawa tengah memperoleh dana desa sejumlah 6.384.182.479.06. Kemudian pada tahun 2024 telah menyalurkan dana desa sebesar 7.952.173.390.000, maka seharusnya peningkatan ini dapat menciptakan kesejahteraan dan memperbaiki taraf hidup masyarakat desa (Priyatna *et al.*,

2026). Namun peningkatan jumlah dana desa belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kemiskinan di daerah pedesaan. Menurut Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, masih terdapat 923 desa yang masuk dalam kategori miskin ekstrem di Jawa Tengah (antaranews.com). Kondisi tersebut menunjukkan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan secara optimal. Sehingga, pengaruh dana desa terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah masih perlu dikaji secara empiris.

Dana desa menjadi faktor eksternal yang ditunjukkan untuk mengurangi kemiskinan karena bergantung kepada pusat ataupun pihak lain, maka dari itu perlu mempertimbangkan dari beberapa faktor internal lain (Pradhana, 2025). Menurut Todaro dan Smith (2014) kemiskinan ditandai oleh rendahnya pendapatan, keterbatasan kesempatan kerja dan rendahnya kualitas sumber daya manusia pada pendidikan dan kesehatan yang dibutuhkan dalam mencapai standar hidup yang layak dalam proses pembangunan ekonomi. Kemiskinan dapat terjadi jika kualitas hidup individu rendah meskipun pendapatannya berada diatas garis kemiskinan (Cao *et al.*, 2022).

Berdasarkan teori modal manusia, yang dikembangkan Schultz dan Becker menjelaskan bahwa investasi dalam sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan pelatihan dapat meningkatkan produktifitas dan pendapatan yang lebih tinggi dipasar tenaga kerja. Sehingga kotribusinya pada pertumbuhan ekonomi serta menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diterbitkan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) sebagai indikator keberhasilan pembangunan manusia. IPM memiliki tiga dimensi yaitu indikator angka harapan hidup mengukur kesehatan, pendidikan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-

Rata Lama Sekolah dan indikator daya beli untuk mengukur standar hidup (Mulia & Saputra, 2020).

Salah satu upaya dalam pengurangan kemiskinan yaitu melalui sumber daya manusia seperti peningkatan kesehatan. Menurut *World Health Organization* (2024) kesehatan dapat dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup yang mempresentasikan kualitas kesehatan suatu wilayah. Penduduk yang hidup lebih lama atau berumur panjang memiliki tingkat kesehatan yang baik, hal ini didukung dengan layanan kesehatan, program sosial dan program kemiskinan yang baik (Jannah *et al.*, 2025). Berdasarkan BPS (2024) Angka Harapan Hidup merupakan perkiraan rata rata lama hidup seseorang yang ditentukan oleh keadaan kesehatan, sanitasi, ekonomi serta faktor sosial yang ada, serta berdasarkan pola mortalitas (kematian) penduduk pada suatu wilayah dan tahun tertentu. Dengan demikian, peningkatan angka harapan hidup menunjukkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat dan alat evaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan status kesehatan penduduk, sehingga masyarakat mampu berpartisipasi dalam proses pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik angka harapan hidup di provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan selama periode 2017-2024. Peningkatan angka harapan hidup didasarkan pada perbaikan taraf kesehatan yang dilakukan pemerintah Jawa Tengah melalui berbagai kegiatan kesehatan seperti peningkatan status gizi dan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai (Cholily, 2024). Maka dengan perkembangan kesehatan di Jawa Tengah seharusnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, nyatanya kemiskinan di Jawa Tengah belum menurun secara signifikan. Dengan

demikian penelitian pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan perlu dikaji ulang di Provinsi Jawa Tengah.

Provinsi Jawa Tengah berupaya mengurangi kemiskinan juga berusaha dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurut Todaro & Smith (2014) tingkat pendapatan sangat dipengaruhi oleh lamanya individu dalam memperoleh pendidikan, maka semakin lama seseorang menempuh pendidikan akan meningkatkan bekerja di usia lebih tua, sehingga pendapatan yang didapat akan cepat naik dari pada orang yang bekerja lebih awal diusia muda. Menurut Diaz (2010) pendidikan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, namun dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang karena masyarakat yang lebih terdidik cenderung lebih produktif dan inovatif, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan memperbaiki taraf hidupnya. Maka dari itu pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, sehingga dapat memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan pendapatan (Heckman *et al.*, 2018).

Secara empiris, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firdaus *et al.*, (2021) faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu rata-rata lama pendidikan, rasio ketergantungan, dan harapan hidup. Berdasarkan BPS (2024) pendidikan memiliki indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata tahun pendidikan formal yang dilakukan penduduk usia berusia 25 tahun keatas. Selain itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik harapan lama sekolah adalah perkiraan jumlah tahun pendidikan yang berpotensi dijalani oleh seorang anak dalam menempuh pendidikan di masa mendatang. Maka, peningkatan pendidikan menggambarkan peningkatan akses pendidikan disuatu daerah, yang diharapkan

mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang (Shafiyah & Imaningsih, 2025). Dengan demikian, indeks pendidikan dapat diukur menggunakan indikator rata-rata lama individu bersekolah dan harapan lama sekolah. Variabel pendidikan dalam penelitian ini didasarkan pada perannya dalam berkontribusi terhadap produktivitas, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan BPS (2025) pendidikan antar kabupaten cenderung mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun sudah mengalami peningkatan, masih terdapat kesenjangan pendidikan antar kabupaten. Hal ini dapat dilihat dari indeks pendidikan pada tahun 2024 adalah Sukoharjo sebesar 72,03 dengan RLS sebesar 10,01 tahun dan HLS 13.92 tahun. Serta daerah yang memiliki indeks pendidikan rendah yaitu Kabupaten Pemalang sebesar 55,26 dengan RLS sebesar 6,56 tahun dan HLS sebesar 12,02 tahun. Berdasarkan statistik pendidikan tahun 2024 pemerintah terus berupaya dalam meningkatkan taraf pendidikan melalui perluasan akses pendidikan pada tingkat dasar hingga sarana dan prasarana pendidikan, selain itu terdapat pelaksanaan program pendidikan gratis pada tingkat dasar. Hal ini mendukung perluasan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, karena jika masyarakat memiliki pendidikan yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan produktivitas dan inovasi individu dalam bersaing di pasar tenaga kerja (Kampelmann *et al.*, 2018). Sehingga masyarakat yang memiliki pendidikan lebih lama dapat memiliki peluang dalam mengurangi kemiskinan (Hofmarcher, 2021).

Faktor lain yang mempengaruhi kemiskinan yaitu pengangguran. Menurut Khairuddin (2025) pengangguran menjadi faktor utama kemiskinan karena jika seseorang kehilangan pekerjaan secara langsung dapat mengurangi pendapatan

rumah tangga. Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan umumnya tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga daya beli masyarakat menurun dan tingginya risiko terjebak dalam kemiskinan (Qomarina *et al.*, 2025). Indonesia menjadi negara berkembang sering kali memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, hal ini berkaitan dengan kualitas tenaga kerja yang rendah, terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan, serta ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri (Qomarina *et al.*, 2025). Dengan demikian, pengangguran dan kemiskinan sering digambarkan sebagai lingkaran setan, di mana pengangguran menyebabkan hilangnya pendapatan rumah tangga dan meningkatkan risiko jatuh ke dalam kemiskinan, sementara kemiskinan membatasi akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan modal sosial yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

Penelitian ini menggunakan variabel tingkat pengangguran terbuka yang didasarkan sebagai proporsi angkatan kerja yang belum memperoleh pekerjaan. Berdasarkan Badan Pusat statistik TPT di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2017-2024 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2020 Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan TPT yang signifikan karena adanya covid-19. Meskipun mengalami penurunan setelah pandemi covid-19, masih terdapat kabupaten yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Tegal. Pada tahun 2024 Kabupaten Brebes memiliki tingkat pengangguran terbuka tertinggi dibandingkan daerah lain sebesar 8,35% dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,91%. Meskipun mengalami peningkatan di beberapa kabupaten, pengangguran dari tahun 2021 hingga 2024 cenderung mengalami penurunan. Hal ini seharusnya dapat berkontribusi dalam penurunan kemiskinan, nyatanya kemiskinan di Jawa Tengah

masih tinggi dari rata rata nasional. Maka dari itu analisis pengangguran terhadap tingkat kemiskinan perlu dikaji ulang.

Berdasarkan uraian tersebut, Provinsi Jawa Tengah dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan Provinsi dengan tingkat kemiskinan terbesar kedua di pulau jawa dan tingkat kemiskinan yang berbeda antar Kabupaten. Serta 29 Kabupaten yang digunakan sebagai objek karena seluruh kabupaten menjadi penerima dana desa dari pemerintah pusat, yang diindikasikan dapat mengurangi tingkat kemiskinan di daerah pedesaan. Disisi lain, kualitas sumber daya manusia dan dukungan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan perkembangan yang cenderung membaik pada tahun 2017 hingga 2024. Secara teoritis, kondisi tersebut seharusnya mampu mempercepat penurunan tingkat kemiskinan, termasuk di wilayah pedesaan yang menjadi sasaran utama program dana desa. Namun, persentase penduduk miskin masih relatif tinggi di beberapa Kabupaten dan penurunan yang tidak signifikan. Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antar capaian pembangunan dan hasil pengetasan kemiskinan, sehingga pengaruh jumlah dana desa, kesehatan, pendidikan dan pengangguran terhadap kemiskinan di 29 Kabupaten Provinsi Jawa Tengah perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan berbagai penelitian menunjukkan hasil yang belum konsisten terkait dana desa, kesehatan, pendidikan dan pengangguran berpengaruh dalam menurunkan kemiskinan. Penelitian yang dilakukan (Zaen *et al.*, 2025) dana desa memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Sitorus *et al.*, (2025) Angka Harapan Hidup dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Selain itu penelitian Batari *et al.*, (2023) rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap

kemiskinan. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Ramadhani & Utomo (2025) dana desa dan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Nugroho & Ari (2024) menyatakan indeks kesehatan dan indeks pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Serta penelitian yang dilakukan oleh Sugiharjo *et al.*, (2022) rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada mengakomodir atau memasukkan variabel independen yang digunakan dalam model regresi data panel yang mana pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan salah satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel ini terkait dengan faktor fiskal dan faktor sumber daya manusia dalam menjelaskan kemiskinan pada tingkat kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, penggunaan tingkat pendidikan menggunakan indeks dari penggabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Peneliti tertarik untuk mengulas sejauh mana program pemerintah dan kualitas sumber daya manusia mempengaruhi tingkat kemiskinan, yang berjudul “Pengaruh Jumlah Dana Desa, Kesehatan, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017–2024”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengaruh dari jumlah dana desa, angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan yang sudah dijelaskan dilatar belakang, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah ada pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan?
2. Apakah ada pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan?

3. Apakah ada pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan?
4. Apakah ada pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di atas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dana desa terhadap tingkat kemiskinan.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan.
4. Untuk menganalisis pengaruh pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

1.4 Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dan teoritis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan menjadi sebuah penelitian yang dapat memberikan informasi serta referensi bagi pengembang ilmu pengetahuan, terutama ilmu ekonomi pembangunan yang menjelaskan tentang pengaruh jumlah dana desa, kesehatan, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi seluruh pihak, termasuk:

a. Bagi Mahasiswa Prodi Ekonomi Pembangunan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pengaruh jumlah dana desa, kesehatan, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan rujukan dan sumber pengetahuan dalam merumuskan penelitian terkait dana desa, kesehatan, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat agar mengetahui dampak adanya jumlah dana desa, kesehatan, pendidikan dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.